

KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM *INDIAN OCEAN RIM* *ASSOCIATION* TAHUN 1997-2007

Rahayu Williyanti

Dr. Sidik Jatmika, M.Si.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Australia is a former British colony. From its first establishment as a federal colony in 1901 to 1942 Australian foreign policy was still governed by the British. Until World War II when Japan began to intensively attack the countries in Asia Pacific, Australia began to feel threatened in addition to Singapore, the British colony that fell into the hands of Japan. As Britain withdrew from Singapore and began to engage with war in Europe, Australia began to align itself with the United States to prevent attacks from Japan. Post-World War II Australia began to realize that its interests were different from the western countries and began to realize its geographical position is different from the western countries, therefore Australia has a different enemy from the western countries. Since then Australia began to focus on the its neighbors countries. Until 1997 Australia with India, Kenya, Mauritius, Oman, Singapore and South Africa established a regional cooperation, the Indian Ocean Rim Association (IORA). Australia and other countries in the Indian Ocean region saw the potential of the Indian Ocean, until finally they decided to establish IORA. IORA was formed to enhance economic cooperation in the Australian region. This study discusses Australia's interests in the IORA. Australia's interests eventually decided to establish IORA influenced by domestic conditions, economic and military conditions, and international contexts.

Keyword : Australia, IORA, Indian Ocean, Foreign Policy

Pendahuluan

Sejarah tentang arah politik luar negeri Australia memiliki alur yang cukup panjang. Di mulai dari keberhasilan ekspedisi yang dilakukan oleh Kapten James Cook pada tahun 1770. James Cook berhasil berlabuh di Botany Bay (sekarang New South Wales), kemudian wilayah ini dijadikan tempat pengasingan bagi para narapidana Inggris. Hal ini terjadi karena berakhirnya perang kemerdekaan Amerika Serikat di tahun 1783 membuat Inggris tidak dapat lagi mendeportasi para tahanan ke Amerika Serikat, sedangkan jumlah tahanan terus bertambah. Pada 26 Januari 1788, 11 kapal Inggris berhasil mendarat di Botany Bay dengan membawa penumpang sebanyak 1487. Diantara penumpang tersebut 759 adalah narapidana dan tahanan politik. Sisanya adalah tentara dan petugas rumah tahanan. Banyaknya orang Inggris yang mendarat pada hari itu membuat 26 Januari ditetapkan sebagai 'Australia Day' (Sabari, 1991). Sejak itu Australia resmi menjadi tanah jajahan Inggris.

Politik luar negeri Australia pada awal berdiri masih diatur oleh Inggris. Hal ini tidak menjadi masalah karena saat itu Australia menganggap bahwa kepentingan luar negerinya sama dengan Inggris. Disamping itu, Australia juga belum siap jika menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Australia masih sangat bergantung pada Inggris. Hingga pada tahun 1907, Australia, Kanada dan Selandia Baru memperoleh status dominion (Siboro, 2012) yang diberikan oleh Inggris. Dengan adanya status ini berarti Australia memiliki kemerdekaan penuh untuk mengatur urusan dalam dan luar negerinya meski masih tetap meamandangi Raja/Ratu Inggris sebagai Raja/Ratunya. Namun hingga pecahnya Perang Dunia I, Australia belum memiliki perwakilan diplomatik di luar anggota British Commonwealth of Nations.

Berakhirnya Perang Dunia I menyebabkan dampak positif terhadap pandangan luar negeri Australia. Bangsa Australia patut berbangga dengan kemampuan pasukannya dalam Perang Dunia I. Pasalnya kemampuan dari pasukan Australia ini tidak dapat diragukan lagi karena memiliki kualitas yang sebanding dengan negara – negara yang sudah lama berdiri. Rasa kebanggaan ini yang kemudian menyadarkan bangsa Australia, bahwa mereka patut disejajarkan dengan bangsa lain. Selain itu, keikutsertaan Australia dalam perjanjian Versailles merupakan bukti bahwa dunia internasional mengakui keberadaan Australia. Ditambah dengan penyerahan daerah bekas jajahan Jerman ke Australia oleh Liga Bangsa – Bangsa menambah bukti kepercayaan dunia Internasional akan Australia. Namun sampai tahun 1940 Australia masih tetap mengandalkan Inggris dalam urusan luar negerinya. Dengan adanya pangkalan angkatan laut Inggris di Singapura menurut Australia sudah dapat menjamin keamanan dari serangan musuh di bagian utara. Hingga pada tahun 1941 ketika Jepang menjatuhkan bomnya di Pearl Harbour yaitu pangkalan laut Amerika Serikat dan kemudian merebut wilayah kekuasaan Amerika yaitu Filipina. Kawasan Asia Tenggara saat itu hampir dikuasai oleh Jepang. Hal ini menyebabkan Australia merasa keamanannya terancam ditambah Inggris yang kurang bisa membantu Australia saat itu karena sedang menghadapi Jerman dan Italia. Kemudian Australia memutuskan untuk meminta bantuan Amerika Serikat sebagai perlindungan dari serbuan Jepang. Sejak saat itu Amerika Serikat menjadi sekutu bagi Australia.

Ancaman keamanan kembali terjadi ketika Perang Dingin, dimana negara komunis mulai menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Amerika Serikat merupakan teman yang pas bagi Australia untuk dapat membendung pengaruh tersebut. Dalam kerjasamanya untuk mempertahankan keamanan Australia bersama dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru membentuk sebuah pakta yaitu ANZUS. Selain itu, Australia bersama Amerika Serikat terus giat untuk membendung pengaruh komunis. Di samping itu Australia juga tidak dapat terus bergantung pada Amerika Serikat.

Peristiwa yang dilalui Australia saat Perang Dunia II menyadarkannya bahwa kepentingan yang dimiliki olehnya berbedaa dengan kepentingan negara – negara barat karena secara geografis mereka memiliki letak yang berbeda dan musuh yang dihadapi pun berbeda. Ditambah dengan perubahan dari lingkungan strategisnya yang mulai tak aman lagi, banyaknya terjadi pertikaian dan ketegangan politik. Kemudian Australia memutuskan untuk mengganti kebijakan pertahanannya menjadi Self-Defence Strategy (Alami, 2006). Adanya pergantian kebijakan pertahanan ini membuat Australia harus merumuskan kembali kebijakan yang sesuai dengan perubahan kondisi dan jati diri bangsa Australia. Paul Dibb yang merupakan seorang mantan personel Departemen Pertahanan Australia ditugaskan oleh Menteri Pertahanan Australia saat itu, Kimbeazley untuk mengevaluasi dan memberikan masukan tentang kemampuan Australia di bidang pertahanan.

Paul Dibb melalui Dibb's Report mengusulkan empat lapis strategi penangkalan pertahanan Australia. Pada lapis pertama, adanya prioritas pengawasan sejauh 1000 – 1500 mil ke luar wilayah Australia dimaksudkan untuk mendeteksi para penyusup di wilayah laut dan udara. Lapis kedua, ditekankan pada kemampuan dan kekuatan laut dan udara untuk melakukan penyerangan terhadap ancaman yang melintas di wilayah laut dan udara Australia. Lapis ketiga, lebih fokus pada kemampuan bertahan untuk mencegah musuh yang mendekati ke wilayah penting di antaranya di jalur pelayaran Australia. Lapis keempat, mengandalkan mobile ground forces guna menumpas ancaman yang berhasil melewati laut dan udara yang dianggap membahayakan aset-aset penting dan pemukiman penduduk. Namun pernyataan Paul Dibb dinilai terlalu defensif dan isolasionis terlepas dari itu masukan Paul Dibb tersebut dijadikan dasar tinjauan kekuatan pertahanan Australia. (Alami, 2006)

Pada 1987, setahun setelah Dibb's Report dikeluarkanlah Buku Putih Pertahanan Australia "The Defence of Australia". Dalam Buku Putih ini lebih ditekankan pada kerjasama keamanan yang lebih dekat dengan kawasan dan juga menegaskan kembali pentingnya aliansi militer. Buku Putih ini juga mengadopsi usulan dari Paul Dibb, terbukti dengan adanya empat lapis strategi penangkalan. Namun Buku Putih ini lebih bersifat ofensif. Kemudian pada tahun 1994, dikeluarkannya Buku Putih Pertahanan Australia "Defending Australia", dengan lebih menekankan pada kerjasama pertahanan dengan negara – negara tetangga kurang menekankan pada ikatan pertahanan Australia dan Amerika Serikat.

Saat itu Australia lebih fokus pada ancaman dari bagian utara, sehingga Australia lebih berfokus pada negara – negara Asia Tenggara, Timur dan Pasifik Selatan. Perlahan hegemoni Australia dan Selandia Baru mulai terlihat di Pasifik Selatan. Hal ini dikarenakan Australia dan Selandia Baru merupakan negara yang besar di kawasan tersebut dan memiliki kekuatan yang cukup dibandingkan dengan negara lainnya. Australia dan Selandia Baru memiliki kontribusi yang besar dalam menjaga stabilitas keamanan di Pasifik Selatan diantaranya yaitu mengatasi pemberontakan di Papua New Guini dan konflik internal di Kepulauan Solomon.

Pada tahun 1997 Australia memutuskan untuk bekerja sama dengan India, Kenya, Mauritius, Oman, Singapura dan Afrika Selatan untuk mendirikan Indian Ocean Rim Association (IORA). IORA merupakan sebuah organisasi internasional yang menaungi negara-negara di kawasan Samudera Hindia dalam kerjasama di bidang ekonomi, keamanan dan keselamatan maritim, dan pendidikan serta kebudayaan. Awalnya organisasi ini merupakan gagasan bersama antara Afrika Selatan, India dan Australia. Hingga pada tanggal 29-31 Maret 1995 diadakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut tentang kerjasama ekonomi diantara negara – negara Samudera Hindia.

Australia yang sebelumnya hanya berfokus untuk menjaga kestabilan di Pasifik Selatan kini membangun kerjasama dengan negara – negara di samudera Hindia. Sebenarnya kepentingan apa yang dimiliki oleh Australia untuk bergabung mendirikan IORA.

Rumusan Masalah

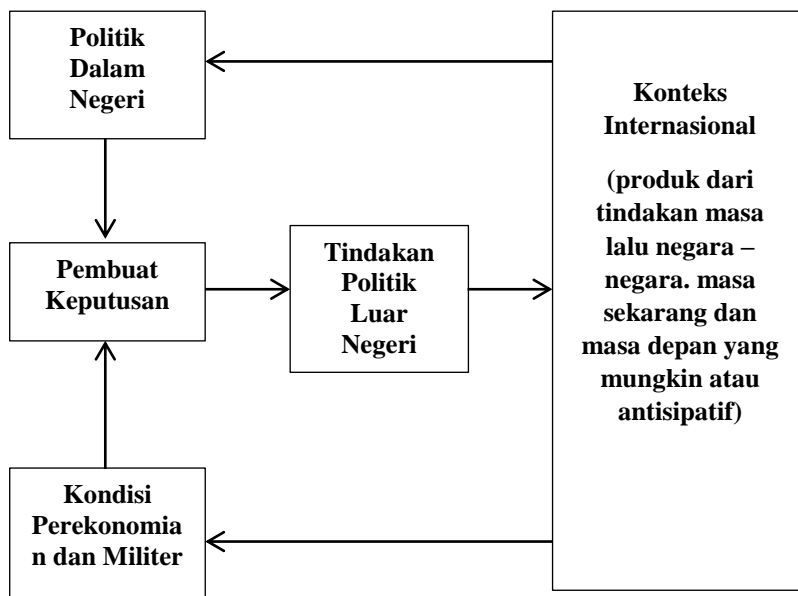
“Mengapa Australia ikut mendirikan Indian Ocean Rim Assosiation bersama negara – negara di Kawasan Samudera Hindia?”

Kerangka Pemikiran

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Untuk menjelaskan kepentingan Australia dalam IORA tahun 1997 – 2007, penulis menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul “Introduction of International Politic”.

Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkain proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang mempengaruhinya. William D. Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil. Pembuatan Keputusan Luar Negeri dibentuk atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Ketiga konsiderasi tersebut yaitu; pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua adalah kapabilitas ekonomi dan militer dan yang terakhir adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. (Coplin, 2003) Berikut adalah model teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri:

Gambar 1.1 Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri Menurut William D. Coplin



Sumber : Coplin, W. D. (2003). Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis. Bandung: Sinar Baru Algezindo.

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisikondisi tertentu. Terjadi interaksi antara

pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan policy influencer. Interaksi tersebut terangkai dalam sistem pengaruh kebijakan.

Lebih jauh Coplin menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan policy influencer. Policy influencer merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokrasi maupun yang autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada kemauan rakyatnya untuk memberi dukungan. Dukungan dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjata, keuangan dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum dan lain - lain. Rezim yang memerintah sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk membuat kedudukannya lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya.

Dalam konteks Australia yang memiliki dua partai mayoritas dengan perspektif yang berbeda dan masing – masing partai memiliki kekuatan yang seimbang. Kemudian arahan politik luar negeri Australia pun akan berbeda tergantung dari partai mana perdana menteri berasal. Tiga pilar tradisi politik luar negeri Australia menurut pendapat Petrov (2008 dalam Darmawan, 2012), yaitu :

a. Tradisi Menzies (Partai Liberal) yang digambarkan sebagai tradisi realistik, pragmatis, dan berpusat pada kekuatan. Disini pandangan Menzies difokuskan pada kenyataan keterisolasian Australia dapat diatasi dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat.

b. Tradisi Evatt (Partai Buruh) yang memperlihatkan gambaran nasionalis dan internasionalis, sebab Evatt berpedoman organisasi internasional (dalam hal ini PBB) merupakan forum yang cukup efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Arah pilar kedua ini adalah kekuatan dan nilai kebebasan dan pemahaman tentang identitas diri suatu bangsa.

c. Tradisi Spender dan Casey (Partai Liberal) menekankan pada pentingnya wilayah regional dan kerjasama aktif dengan Asia.

Sampai saat ini ketiga pilar tersebut masih relevan dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan politik luar negeri Australia, meskipun penekanannya sangat ditentukan oleh kondisi dari partai manakah perdana menteri Australia berasal.

2. Kapabilitas Ekonomi dan Militer

Ekonomi dan militer merupakan dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran ekonomi suatu negara. Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variabel ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama negara-negara Eropa menjajah Asia dan Eropa. Perusahaan-perusahaan dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi, namun lebih kepada penaklukan wilayah dengan dukungan kekuatan militer yang lebih kuat.

Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka negara tertentu akan lebih aktif dalam “panggung” politik internasional. Khusus militer, Coplin menerangkannya dengan 3 kriteria utama, yaitu; jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya (Coplin, 2003). Ketiga kriteria tersebut merupakan pembeda kekuatan-kekuatan

militer suatu negara. Dengan merujuk pada ketiga kriteria tersebut, pengambil keputusan luar negeri dapat melihat sejauh mana militer akan efektif. Dengan kata lain, kemampuan Ekonomi dan Militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (*bargaining position*) dimata negara lain. Sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan Ekonomi dan Militer merupakan dua unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Singkatnya, semakin baik perekonomian dan militer suatu negara, maka akan semakin mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya. (Coplin, 2003)

Australia sebagai Negara yang diapit dua samudera dan berada di lokasi yang strategis di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan menggantungkan perekonomiannya pada perdagangan internasional. Samudera Hindia sebagai jalan penghubung untuk menyalurkan perdagangan internasionalnya ke benua Afrika, dan benua Asia terutama wilayah anak benua India dan Asia Tenggara. Tingginya angka perompakan di wilayah perairan samudera Hindia membuat Australia harus mencari cara agar perdagangan internasionalnya ke negara – negara samudera Hindia terganggu dan menyebabkan kerugian. Pada tahun 1997 dicetuskan organisasi internasional yang bertujuan untuk mengurangi perompakan yang ada di wilayah samudera Hindia dan Australia menjadi salah satu pendirinya. Ini salah satu tujuan mengapa Australia bergabung yaitu untuk melindungi jalur perdagangannya dari perompak. Dengan bergabungnya Australia ke dalam Indian Ocean Rim Association sekaligus bertujuan untuk memperkuat pertahanannya dengan kerjasama dengan negara – negara yang berada dekat dengannya.

3. Konteks Internasional

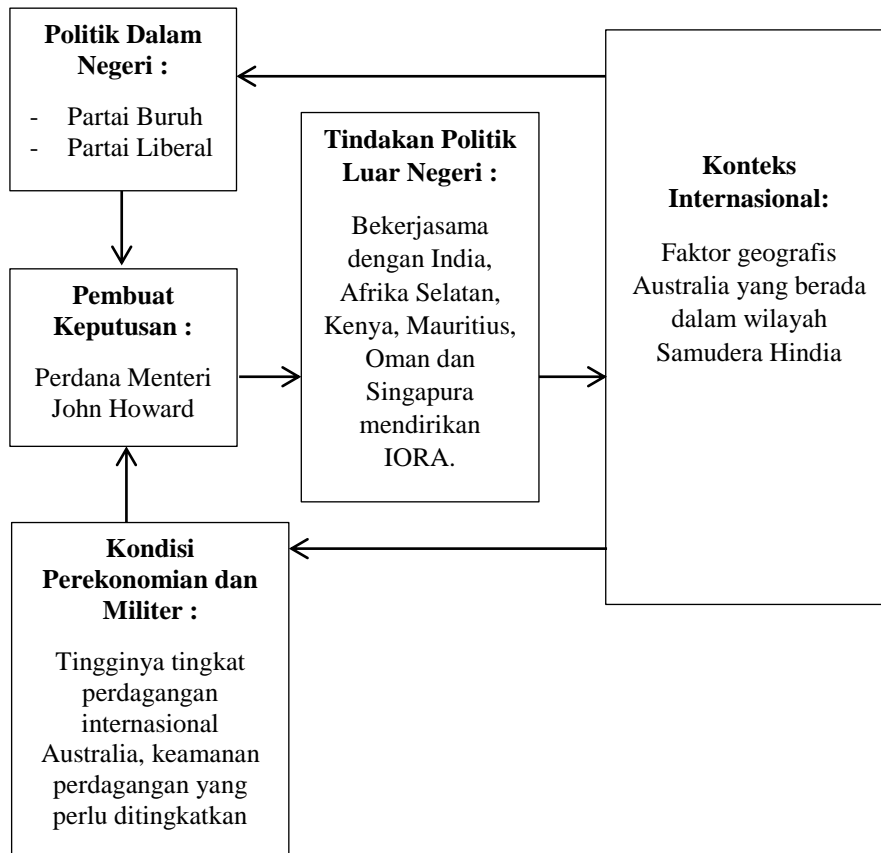
Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara dan ilmuwan realis telah memberikan penjelasannya (Coplin, 2003). Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat digunakan untuk memetakan negara mana yang kawan dan yang lawan.

Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkaitan dengan lokasi dan hubungannya dengan negara-negara lain dalam sebuah sistem politik internasional. Hubungan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Namun geografi lebih memainkan peranan yang penting, walaupun tidak yang terpenting. Faktor geografi merupakan yang utama dalam terciptanya organisasi lintas negara seperti Uni Eropa, NATO, ASEAN dll. Sehingga tercipta hubungan-hubungan politik dan ekonomi antar sesama negara anggota. Pengambil kebijakan luar negeri harus melihat itu dalam membuat keputusan. (Coplin, 2003)

Australia sebagai negara yang berada diantara Samudera Hindia dan Pasifik memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama secara regional dengan beberapa negara. Sesuai dengan kepentingan nasionalnya yaitu menjaga stabilitas keamanan di sekitar wilayahnya. Australia mencoba turut aktif dalam organisasi internasional.

Berikut adalah skema dari aplikasi teori pengambilan keputusan oleh Wiliam D. Coplin.

Gambar 1.2 Aplikasi Teori Pengambilan Keputusan William D. Coplin



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

PEMBAHASAN

A. Keadaan Dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi – kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor – aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan policy influencer. Interaksi tersebut terangkai dalam sistem pengaruh kebijakan. Lebih jauh Coplin menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan policy influencer. Hal tersebut berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokrasi maupun yang autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada kemauan rakyatnya untuk memberi dukungan. Dukungan dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjata, keuangan dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum dll. Rezim yang memerintah sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk membuat kedudukannya lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya. Hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri ini dengan para pengambil keputusan disebut policy influences system (sistem pengaruh kebijakan). Policy influencer merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim

tertentu dalam suatu negara. Menurut William D. Coplin, Policy Influencer terbagi menjadi 4 yaitu birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan opini publik. Dalam Kebijakan yang dikeluarkan oleh John Howard mengenai kerjasama Australia bersama India, Kenya, Mauritius, Oman, Singapura dan Afrika Selatan untuk mendirikan IORA, partai politik menjadi Policy Influencer yang paling berpengaruh.

Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama, dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan Inggris dan Amerika namun tetap khas Australia. Persemakmuran Australia didirikan pada 1 Januari 1901, yang disebut juga Hari Federasi, ketika enam bekas koloni Inggris (sekarang adalah keenam negara bagian Australia) setuju untuk berserikat. Konstitusi Australia, yang pertama kali berlaku pada 1 Januari 1901, meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Australia. Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak pendapat. (Australian Broadcasting Commission)

Australia dikenal sebagai negara Monarki Konstitusional. Ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi. Kepala negara Australia ialah Ratu Inggris. Dalam kenyataannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol. Di Australia, Ratu secara resmi diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal. Meski diakui Gubernur Jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia, posisinya tidak harus mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak veto dari Ratu dan Pemerintah Inggris. Dalam Konstitusi, wewenang dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil, menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen, menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim. Namun, berdasarkan konvensi, Gubernur Jenderal hanya bertindak atas permintaan para Menteri dalam hampir semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi Gubernur Jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan Pemerintah. Keenam Gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama di daerah mereka masing-masing. (Australian Broadcasting Commission)

Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar: House of Representatives atau Majelis Rendah (DPR) dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggungjawab menetapkan Undang – Undang berskala nasional seperti: perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum sebelum menjadi Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah. DPR (House of Representatives), mengusulkan sebagian besar rancangan Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah. (Australian Broadcasting Commission)

Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri (yang dapat diamandemen parlemen setempat) tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara.

Bilamana suatu Peraturan Negara Bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional Federasi, maka Peraturan Pemerintah Federasi berlaku di atas wewenang Peraturan negara bagian. Semua Parlemen negara bagian kecuali Queensland, bersifat bikameral yakni mempunyai majelis rendah dan majelis tinggi. Sementara parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) hanya memiliki satu majelis. Pemerintah negara bagian dan teritori menangani masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana jalan, pemanfaatan lahan publik, perangkat kepolisian, pemadam kebakaran dan pelayanan ambulans, serta keberadaan pemerintah lokal dalam wilayahnya masing-masing. (Australian Broadcasting Commission)

Pemilu di Australia dilaksanakan untuk memilih wakil – wakil rakyat, baik di tingkat federal (nasional) maupun di tingkat negara bagian dan teritori. Pada tingkat federal, sistem majelis dan keanggotaannya sudah diatur berdasarkan konstitusi. Majelis rendah atau House of Representatives beranggotakan 148 orang, yang dipilih dari masing – masing negara bagian secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. berdasarkan konstitusi, pemilu bagi anggota majelis rendah normalnya dilaksanakan 3 tahun sekali; tetapi dapat dilakukan pemilu sebelum habis masa bakti 3 tahunan, bila mayoritas anggota parlemen menghendakinya. Keanggotaan majelis tinggi federal atau senat juga sudah ditetapkan oleh konstitusi, yaitu setengah dari jumlah anggota majelis rendah. Sebagai majelis bagi negara bagian, maka tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk, setiap negara bagian memiliki jumlah senator yang sama, yaitu masing – masing 12 senator. Kecuali bagi teritori Northern Territory dan Australian Capital Territory, yang masing – masing memiliki dua senator. Setengah dari jumlah senator negara – negara bagian dan teritori dipilih untuk masa bakti 3 tahun. Sedangkan sisanya dipilih 6 tahun sekali, sehingga terdapat setengah dari seluruh senator yang pension di tengah satu periode masa bakti senat. (Hamid, 1999)

Perdana Menteri tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh internal partai politik yang saat itu memenangkan suara mayoritas di pemilu (Prihatini, 2016). Oleh karena itu ideologi dari partai politik pengusung Perdana Menteri memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Perdana Menteri tersebut. Seperti yang terjadi pada Partai Liberal. Partai ini dibentuk oleh anggota – anggota parlemen yang berasal dari kelompok kapitalis kelas menengah, sebagai penentang mereka terhadap keterwakilan gerakan buruh, yang masuk melalui Partai Buruh, dalam Parlemen Federal (Hamid, 1999). Partai Liberal sempat beberapa kali berganti nama. Partai ini memiliki masa kepemimpinan yang cukup panjang jika dibandingkan dengan partai oposisi yaitu Partai Buruh. Bahkan, partai ini pernah memerintah selama 23 tahun yaitu pada tahun 1949 sampai 1972 dibawah kepemimpinan Menzies, Holt dan Gorton (Hamid, 1999).

Menurut pendapat Petrov (2008) ada tiga pilar tradisi politik luar negeri Australia, yaitu :

- a. Tradisi Menzies (Partai Liberal) yang digambarkan sebagai tradisi realistik, pragmatis, dan berpusat pada kekuatan. Disini pandangan Menzies difokuskan pada kenyataan keterisolasian Australia dapat diatasi dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat.
- b. Tradisi Evatt (Partai Buruh) yang memperlihatkan gambaran nasionalis dan internasionalis, sebab Evatt berpedoman organisasi internasional (dalam hal ini PBB) merupakan forum yang cukup efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Arah pilar kedua ini adalah kekuatan dan nilai kebebasan dan pemahaman tentang identitas diri suatu bangsa.
- c. Tradisi Spender dan Casey (Partai Liberal) menekankan pada pentingnya wilayah regional dan kerjasama aktif dengan Asia.

John Howard merupakan Perdana Menteri yang berasal dari Partai Liberal yang mana dalam kebijakannya, Howard membawa Australia pada kerjasama regional dengan turut mendirikan Indian Ocean Rim Association (IORA) bersama negara – negara lain yang berada di kawasan Samudera Hindia. Dalam kebijakan ini Partai Liberal turut mempengaruhi keputusan dari Howard. Howard juga dikenal sebagai Perdana Menteri yang memegang teguh nilai – nilai dari partainya.

B. Kondisi Ekonomi dan Militer Australia

Pada masa koloni Australia menerima aliran modal dari negara – negara Eropa Barat, terutama Inggris. Sebagai gantinya, Australia menjadi pemasok bahan – bahan pertambangan, produk – produk pertanian serta barang – barang industri bagi pasar Inggris. Setelah Inggris bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), ekspor Australia ke Inggris pun berkurang. Namun Australia tetap mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan luar negeri. Pasar – pasar yang menjadi target dari ekspor Australia pun bervariasi dan memiliki letak yang jauh dari Australia, seperti Eropa Barat, Amerika Utara dan Asia, terutama Jepang. Perdagangan internasional ini menjadi salah satu pertimbangan kepentingan nasional Australia yang utama. (Hamid, 1999)

Tahun 1997 – 1998 terjadi krisis perkonomian di antara negara – negara Asia yang menjalin kerjasama perdagangan dengan Australia. Krisis ekonomi yang terjadi di Asia ini mempengaruhi semua variable ekonomi makro, termasuk suku bunga, harga saham, pendapatan nasional dan tingkat inflasi serta membuat nilai tukar uang jatuh (Makin, 1999). Namun, hal tersebut tidak membuat perekonomian Australia goyah. Ekonomi Australia terus tumbuh menguat pada tahun 1997 – 1998.

Howard membawa Australia pada peningkatan ekonomi yang cukup stabil. Kebijakan yang dikeluarkannya membangun kembali kemakmuran Australia. Tingkat pengangguran rendah yang dicapai dengan membebaskan pasar tenaga kerja, ekspansi besar-besaran dalam peluang untuk memperoleh keterampilan, dan sangat meningkatkan bantuan penempatan kerja bagi para penganggur - memungkinkan pekerja menjadi kurang bergantung pada serikat pekerja. Terbukti dengan menurunnya tingkat pengangguran pada tahun 1999 menjadi 7,5% setelah sebelumnya pada tahun 1995 mencapai 8,5% (Nations Encylopedia). Tingkat pertumbuhan GDP 3,8% per tahun.

Nilai GDP Australia pada 2006 – 2007 sedikit di atas \$1 triliun, menjadikannya ekonomi terbesar ke 13 secara keseluruhan di dunia dan terbesar ke 10 diantara ekonomi industri. Sebagai hasil diversifikasi besar basis ekspor Australia, Australia kini tidak hanya pengekspor komoditas, namun juga memiliki industri pabrikan dan jasa yang canggih. Nilai ekspor barang dan jasa Australia mencapai \$215,8 milyar pada 2006 – 2007, dengan ekspor jasa sebesar \$46,2 milyar — 21,4 % dari keseluruhan ekspor. (Kedutaan Besar Australia)

Seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi Australia, Howard pun meningkatkan anggaran belanjanya untuk sektor pertahanan Australia. Hal ini tentunya untuk meningkatkan keamanan nasional Australia.

C. Konteks Internasional

Menurut Coplin (2003), dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara terdapat tiga elemen dasar, yaitu geografis, ekonomi dan politis. Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkenaan dengan lokasi dan kaitannya dengan negara-negara lain dalam sebuah sistem politik internasional. Keterkaitan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan politik.

Namun geografi lebih memainkan peranan yang penting, walaupun tidak yang terpenting.

Australia terletak di antara dua samudera terbesar di dunia, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Samudera Hindia merupakan samudera terbesar ketiga di dunia yang mana ditinggali oleh 2,7 miliar penduduk dunia. Setengah dari perjalanan kontainer dunia melewati Samudera Hindia. Samudera ini membentang lebih dari 6.200 mil (10.000 km) antara ujung selatan Afrika dan Australia dan memiliki luas sekitar 28.360.000 mil persegi (73.440.000 km persegi). Samudera Hindia dibatasi oleh Iran, Pakistan, India dan Bangladesh di utara; Semenanjung Malaya, Kepulauan Sunda Indonesia, dan Australia di timur; Antartika ke selatan; dan Afrika dan Semenanjung Arab ke barat. Di barat daya bergabung dengan Samudera Atlantik selatan ujung selatan Afrika, dan ke timur dan tenggara perairannya berbaur dengan Samudera Pasifik. (Kanayev, et al.) Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, Samudera Hindia memiliki banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh negara – negara yang masuk dalam kawasannya. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Hal ini pun disadari oleh negara – negara kawasan tersebut hingga kemudian dibentuklah kerjasama regional yaitu Indian Ocean Rim Assosiation (IORA) pada tahun 1997 di Mauritius. Australia sebagai bagian dari Samudera Hindia tentu ikut menjadi salah satu pendiri kerjasama regional tersebut.

KESIMPULAN

Sejak awal berdirinya Australia sebagai negara federasi koloni pada tahun 1901 sampai dengan tahun 1942, politik luar negeri Australia masih menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Inggris. Hingga segala kepentingan luar negeri Australia saat itu diwakili dan difasilitasi oleh Inggris. Duta besar Inggris yang bertugas tidak hanya mewakili negaranya namun juga berperan mewakili Australia. (Hamid, Sistem Politik Australia, 1999)

Agar lebih mudah dalam memahami perkembangan politik luar negeri Australia sejak awal berdirinya federasi, perkembangan politik luar negeri Australia dibagi ke dalam 3 fase (Siboro, 2012), yaitu; Sebelum Perang Dunia I, Antara Perang Dunia I dan II, serta Sesudah Perang Dunia II.

Australia di masa kepemimpinan John Howard berusaha untuk mengembangkan pertahanan keamanannya. Ancaman yang dianggap membahayakan untuk Australia saat itu berasal dari utara. Australia rawan menerima ancaman dari utara. Hal ini membuat Australia harus menjalin hubungan yang baik dengan negara tetangganya, terutama Indonesia yang merupakan salah satu negara tetangga terdekat Australia. Pada saat kepemimpinan Paul Keating hubungan Indonesia dengan Australia tampak harmonis, namun ketika John Howard menjadi Perdana Menteri Australia hubungan ini mulai renggang karena Australia mengakui kemerdekaan Timor Timur.

John Howard mencoba membangun kapasitas kompetensi perdagangan dan investasi skala internasional dengan penekanan pada pasar Asia – Pasifik, dapat dijelaskan bahwa pandangan politik luar negeri Australia masa kepemimpinan Howard cenderung mengedepankan pihak swasta sebagai kekuatan terdepan dalam diplomasi internasionalnya. Australia dalam penampilan wajah di dunia internasional memperlihatkan dirinya sebagai wakil kepentingan kolonialisme baru di belahan Asia Tenggara. Salah satu ciri demokrasi di Australia adalah memisahkan antara apa yang menjadi kawasan swasta dari kawasan pemerintah. Wajah politik luar negeri Australia dapat sama sekali berbeda dengan wajah politik swastanya. Dengan dalih swasta, pemerintah Australia dapat melepaskan diri dari tuduhan merongrong

negara lain. Peran swasta menjadi garda depan diplomasi yang sangat efektif untuk memperjuangkan agenda-agenda politik sebuah negara (Tangkisan Letug, 2002). Melalui peran pihak swasta inilah Australia berupaya mengembangkan dirinya sebagai investor dan pelaku perdagangan skala dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini Australia menjadi negara salah satu negara terkaya di dunia.

Australia merupakan salah satu negara yang terletak di Samudera Hindia. Samudera terbesar ketiga di dunia. Samudera Hindia memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dunia. Selain itu banyak sumber daya alam yang terkandung di dalamnya diantaranya 60% minyak dunia terdapat di Samudera Hindia. Potensi perikanan juga sangat melimpah yang kemudian memberikan keuntungan yang banyak bagi negara – negara yang berada di kawasan tersebut. Keindahan alam yang ada di Samudera Hindia pun dapat dimanfaatkan dalam sektor pariwisata. Tidak hanya sumber daya alam yang melimpah, tetapi Samudera Hindia pun memiliki sumber daya manusia yang memadai. Banyaknya potensi yang ada tentunya menjadikan tantangan bagi negara – negara di kawasan Samudera Hindia untuk mengelolanya. Walaupun berbagi lautan yang sama, negara – negara di Samudera Hindia menunjukkan perbedaan yang sangat kontras antara satu dengan yang lainnya. Pada tahun 2011, menurut Human Development Index (HDI) yang dirumuskan oleh United Nations Development Program (UNDP), Australia berada pada urutan kedua dari seluruh dunia, sedangkan Mozambik berada pada urutan empat terakhir, yaitu urutan 184. Secara keseluruhan, rata - rata HDI negara - negara di Samudera Hindia hanya 0,597 di mana rata - rata HDI dunia adalah 0,682. 13 negara Samudera Hindia berada di kategori perkembangan manusia rendah dan 6 negara berada di kategori perkembangan manusia yang sangat tinggi. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi negara – negara kawasan Samudera Hindia untuk menjalin kerjasama regional. Hingga terbentuklah Indian Ocean Rim Association (IORA) pada tahun 1997 di Mauritius.

Keputusan Australia untuk ikut mendirikan IORA bersama dengan India, Kenya, Mauritius, Oman, Singapura dan Afrika Selatan merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh John Howard sebagai Perdana Menteri. Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Kebijakan Luar Negeri tersebut dipengaruhi oleh tiga hal yaitu keadaan dalam negeri, kondisi ekonomi militer dan dari segi konteks internasional.

Pengaruh dari kondisi dalam negeri Australia dalam pengambilan keputusan luar negeri datang dari partai politik terutama partai politik dari Perdana Menteri yang menjabat saat itu. John Howard merupakan Perdana Menteri yang saat itu menjabat dan berasal dari Partai Liberal. Partai ini mementingkan kerjasama di wilayah regional sehingga ini mendukung dari kebijakan John Howard untuk menjalin kerjasama dengan negara – negara kawasan Samudera Hindia. Pertumbuhan ekonomi Australia yang terus meningkat membuat Australia meningkatkan pembelanjaan pertahanannya. Selain itu perekonomian Australia juga bergantung pada perdagangan internasional sehingga ini mendorong Australia untuk ikut membangun kerjasama regional di Samudera Hindia. Dalam konteks internasional elemen yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia yaitu geografis. Australia yang berada di kawasan Samudera Hindia didorong oleh negara – negara tetangganya di kawasan tersebut untuk menjalin kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Alexander, D., & al., e. (2012). *Indian Ocean: A Sea of Uncertainty, Future Directions International*. West Perth.
- Balai Penelitian Perikanan Laut . (2014). *Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan*. Jakarta: Ref Grafika.
- Buzan, B. (1978). *A Sea of Troubles? : Source of Dispute in the Ocean Regime*. London.
- Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algezindo.
- Fitriani, E. *et.al.* (2012). *Australia & Negara-Negara Di Kepulauan Pasifik Selatan*. Jakarta: UI-Press.
- Hamid, Z. (1999). *Sistem Politik Australia*. Bandung: LIPFISIPUI.
- Jatmika, S. (2016). *Skripsi Metodologi dan Romantiknya*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Plano, J. C., & Olton, R. (1982). *The International Relations Dictionary, Third Editions*. Dalam J. C. Plano, & R. Olton, *The International Relations Dictionary, Third Editions* (p. 460). California, Western Michigan University: ABC-clio.
- Sabari, J. (1991). *Sejarah Australia Selayang Pandang*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Siboro, J. (2012). *Sejarah Australia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Thornton, C. *et.al.* (1997). *Geografi Australia*. (D. R. Machali, Trans.) Jakarta: Lembaga Australia-Indonesia.
- Wendt, A., Levy, J. S., Little, R., & dkk. (2014). *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional : Pendekatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*. Malang: Intrans Publishing.

Disertasi (Tesis/Skripsi) :

- Ayuningtyas, D. A. (2017). *Kepentingan Indonesia Dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun 2015*. Skripsi, Universitas Mulawarman Samarinda.
- Jatmika, S. (1992). *Politik Luar Negeri Australia Di Pasifik Selatan : Tinjauan aspek Strategi Keamanan*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- McPhail, A. M. (2007). *John Howard's Leadership of Australian John Howard's Leadership of Australian the war against Iraq*. Tesis. Universitas Griffith. Diakses Maret 6, 2018, dari: https://www120.secure.griffith.edu.au/rch/file/6b77266b-f7cb-db9c-af77-8d4d031a302c/1/McPhail_20078_02Thesis.pdf

Widyawati, A.D. (2016). *Kepemimpinan Indonesia Di Indian Ocean Rim Association Dalam Mendukung Kebijakan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Jurnal :

Alami, A. N. Kebijakan Pertahanan Australia Dan Respons Negara-Negara Asia Timur Dan Selandia Baru [Online] // Jurnal Penelitian Politik. - 2006. - Februari 26, 2018. - <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/426>.

Internet :

Australian Broadcasting Commission. (n.d.). *Sistem Politik Australia*. Diakses Maret 25, 2018, dari https://www.google.co.id/url?url=http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_ch art.pdf&rct=j&sa=U&ved=2ahUKEwj24pfemKraAhVDvI8KHXTmAzgQFjADegQIAhAB&q=pemilihan+perdana+menteri+australia&usg=AOvVaw0jUitVcFRHXKFIyiGDgGvn

Australia's Prime Ministers. (n.d.). Diakses Maret 7, 2018, dari National Archives of Australia: <http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/howard/>

Commonwealth of Australia. (n.d.). Treaty of Versailles 1919 (including Covenant of the League of Nations). Diakses Maret 8, 2018, dari Documenting A Democracy: <https://www.foundingdocs.gov.au/item-did-23.html>

Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). *Indian Ocean Rim Association*. Diakses Maret 25, 2018, dari Australia Government: <http://dfat.gov.au/international-relations/regional-architecture/indian-ocean/iora/Pages/indian-ocean-rim-association-iora.aspx>

Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). *Australia and the Indian Ocean region*. Diakses Maret 25, 2018, dari Australia Government: <http://dfat.gov.au/international-relations/regional-architecture/indian-ocean/Pages/indian-ocean-region.aspx>

Hillmer, N. (2006, Juli 2). Statuta Westminster. Diakses Maret 7, 2018, dari The Canadian Encyclopedia: <http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/m/article/statute-of-westminster/>

IORA. (t.thn.). *Background*. Diakses Oktober 25, 2016, dari IORA (Indian Ocean Rim Assosiation): <http://www.iora.net/about-us/background.aspx>

Kanayev, V. F., Morgan, J. R., & Verlaan, P. A. (n.d.). *Indian Ocean*. Diakses Maret 5, 2018, dari Ensiklopedia Britannica: <https://www.britannica.com/place/Indian-Ocean>

Kedutaan Besar Australia. (n.d.). *Gambaran Sekilas tentang Australia*. Diakses April 2, 2018, dari Kedutaan Besar Australia: indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/gambaran_sekilas.html

KEMENLU RI. (n.d.). *Indian Ocean Rim Association*. Diakses Oktober 25, 2016, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IOA.aspx>

- Kompas. (2017, April 25). *Hari Ini dalam Sejarah: Tragedi Militer Sekutu di Gallipoli*. Diakses Maret 6, 2018, dari Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2017/04/25/20300061/hari.ini.dalam.sejarah.tragedi.militer.sekutu.di.gallipoli?page=all>
- Liberal Party. (n.d.). *Achievements in Government*. Diakses Maret 28, 2018, dari Liberal: <https://www.liberal.org.au/achievements-government>
- Liberal Party. (n.d.). *Our History*. Diakses Maret 28, 2018, dari Liberal: <https://www.liberal.org.au/our-history>
- Makin, T. (1999, Maret). *The Asian Currency Crisis And The Australian Economy*. Diakses April 2, 2018, dari https://espace.library.uq.edu.au/data/UQ_145250/UQ145250_OA.pdf?Expires=1523096021&Signature=JnHCHWFz0Wz9KFL1osBrUcsidTmDVJw3dLn~dohbHXO3RGAGbR4bKJdTD9IdVUoTb9HDS42vac42suUmNIRi2TBZj~sdOwQkAC3SobftpaP-eDIauIOauY-QQEA9XdcYq7XV8bJVCXtdGsd~LB~MrsuluX9inijVt
- Maria, R. (2013). *Makalah Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan*. Diakses Januari 9, 2017, dari SlideShare: www.slideshare.net/vitalfrans/makalah-analisis-kebijakan-dan-pengambilan-keputusan
- Nations Encyclopedia. (n.d.). Australia - Economy. Diakses April 3, 2018, dari Nations Encyclopedia: <http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Australia-ECONOMY.html>
- Prihatini, E. S. (2016, Juni 6). *Mengenal Pemilu di Australia*. (Antara News) Diakses Maret 30, 2018, dari Antara News: <https://m.antaranews.com/berita/565431/mengenal-pemilu-di-australia>
- SBS News. (2014, Maret 25). *Effect of WWI Lingered Long In Australia*. Diakses Maret 18, 2018, dari SBS News: <https://www.sbs.com.au/news/effects-of-wwi-lingered-long-in-australia>
- The Commonwealth. (n.d.). *Australia : History*. Diakses Maret 4, 2018, dari The Commonwealth: <http://thecommonwealth.org/our-member-countries/australia/history>
- Trading Economics. (n.d.). *Australia GDP Survey*. Diakses Maret 30, 2018, dari Trading Economics: <https://tradingeconomics.com/australia/gdp/survey>
- Wulandari, R. (2017). Modul Mata Kuliah Penulisan Ilmiah 2017. Diakses Januari 26, 2018, Dari Repository UMY: <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13421/Modul%20Penulisan%20Ilmiah%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>